

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Jambi Tahun 2024, serta jenis pelanggaran yang terjadi di Kota Jambi, dan mengetahui kendala Bawaslu Kota Jambi dalam penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak di Kota Jambi tahun 2024. Jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan Observasi, Wawancara dan Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Bawaslu Kota Jambi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang wewenang dan tugas Bawaslu terhadap Pemilihan Kepala Daerah. Adapun peran dan tugas Bawaslu yang dimaksud adalah: pemuktahiran data dan daftar pemilih, verifikasi partai politik, pencalonan calon anggota, pengawasan kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, hingga dengan penindaklanjutan pelanggaran. Badan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Jambi telah melakukan pengawasan yang melekat pada saat Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 namun belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024. Kendala yang paling melekat adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia serta Infrastruktur Teknologi, kurangnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan personal Bawaslu dalam pengawasan media sosial. Untuk Solusi terhadap kendala yang dialami Bawaslu Kota Jambi perlu bersosialisasi dengan masyarakat serta kolaborasi yang baik antar stakeholder, serta perlu memperdalam ilmu tentang teknologi, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Jambi Tahun 2024 dapat berjalan Adil, Transparan dan Demokratis.

Kata Kunci: Peran Bawaslu, Pemilihan Kepala Daerah 2024, Pelanggaran.

ABSTRACT

The purpose of the study is to find out the Role of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in Handling Violations of the Simultaneous Regional Head Election in Jambi City in 2024, as well as the types of violations that occur in Jambi City, and to find out the obstacles of the Jambi City Bawaslu in handling violations of the simultaneous regional head election in Jambi City in 2024. The type of Qualitative research with a case study approach, involving Observation, Interviews and the data obtained will be analyzed qualitatively and then described in a descriptive form. The results of the study show the role of the Jambi City Bawaslu in Handling Violations of the Simultaneous Regional Head Election in Jambi City in accordance with Law Number 10 of 2016 concerning the authority and duties of Bawaslu towards the Regional Head Election. The roles and duties of Bawaslu in question are: updating data and voter lists, verifying political parties, nominating prospective members, supervising campaigns, procurement and distribution of voting and vote counting equipment, supervising voting, counting, and recapitulation of votes, and following up on violations. The Jambi City Regional Head Election Supervisory Agency has carried out inherent supervision at the time of the Regional Head Election in 2024 but it is not optimal because violations are still found in the process of the Simultaneous Regional Head Election in 2024. The most inherent obstacles are the limitation of Human Resources and Technology Infrastructure, lack of community participation and personal limitations of Bawaslu in social media supervision. For solutions to the obstacles experienced by the Jambi City Bawaslu, it is necessary to socialize with the community and collaborate with stakeholders, and it is necessary to deepen knowledge about technology, so that violations can be minimized and the Simultaneous Regional Head Elections in Jambi City in 2024 can run Fairly, Transparently and Democratically.

Keywords: Role of Bawaslu, 2024 Regional Head Election, Violations.